

Kerangka Acuan Kerja

Tenaga Ahli Penyusunan Panduan Teknis Perencanaan Strategis Daerah Sektor ESDM

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan di Indonesia secara umum diklasifikasi ke dalam pembangunan nasional yang dipimpin oleh Pemerintah pusat, dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik secara individu maupun kelembagaan dan lintas sektor dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen daerah secara terpadu dan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi antara urusan absolut (yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat) dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah sebagai dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dimana urusan konkuren ini terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, di antaranya adalah urusan di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Di antara sasaran pembangunan daerah di sektor ESDM adalah tercapainya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana-rencana besar pembangunan seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dapat diterjemahkan secara lebih terukur, terarah, dan tepat sasaran, termasuk dalam rencana strategis perangkat daerah yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perencanaan pembangunan daerah secara umum, dan NSPK sektor ESDM secara khusus.

PWYP Indonesia sebagai lembaga yang *concern* melakukan perbaikan tata kelola sektor energi dan sumberdaya mineral memberikan perhatian khusus akan pentingnya sinergi Pusat-Daerah dalam mencapai tujuan strategis pembangunan nasional, khususnya di sektor energi dan sumberdaya mineral. Untuk itu, PWYP Indonesia menjalin kerja sama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, khususnya sub-direktorat ESDM untuk mengembangkan panduan teknis (*tools*) bagi penyusunan perencanaan strategis daerah dan monitoring-evaluasi – khususnya di sektor ESDM. Untuk tujuan tersebut, PWYP Indonesia bersama Subdit ESDM Bina Bangda Kemendagri membutuhkan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk menyusun panduan teknis perencanaan dan monitoring-evaluasi bagi Daerah, khususnya di sektor ESDM.

B. Ruang Lingkup Kerja

Tenaga ahli yang dibutuhkan memiliki ruang lingkup kerja yang meliputi:

1. Mempelajari dan melakukan pemetaan atas NSPK dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator capaian dan mekanisme pembinaan, serta monitoring dan evaluasinya.
2. Mempelajari dan melakukan pemetaan atas NSPK sektor ESDM: perencanaan, indikator capaian dan strategi, serta mempelajari pembagian kewenangan dan peran Daerah dalam strategi pencapaiannya.
3. Menyusun panduan teknis bagi Pemda dalam menyusun perencanaan strategis di bidang ESDM: mekanisme, strategi dan indikator capaian, serta mekanisme pembinaan, monitoring dan evaluasinya.
4. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bagi Ditjen Bina Bangda (Khususnya Sub-dit ESDM) dalam mengembangkan

C. Persyaratan dan Kualifikasi

1. Pendidikan minimal S2 di bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan/Illmu Ekonomi/Perencanaan Energi dan Sumberdaya Mineral/Kebijakan publik;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan studi/bekerja di aspek perencanaan pembangunan (pembangunan daerah-nilai lebih) dan kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral;
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis secara kuantitatif dan kualitatif;
4. Memiliki pengalaman dalam menyusun panduan teknis/modul bagi Pemerintah/Pemangku kepentingan;
5. Berintegritas, pembelajar cepat dan mampu beradaptasi dengan baik, memiliki kemampuan berkomunikasi dan menulis dengan baik
6. Memiliki pengalaman dalam bekerja sama/melakukan asistensi teknis dengan Pemerintah (Pusat/Daerah) merupakan nilai lebih;

D. Periode Kontrak

3 (tiga) bulan, terdapat kemungkinan untuk diperpanjang sesuai kinerja dan capaian.

Aplikasi yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran (*cover letter*), disertai CV dan melampirkan portofolio analisis/ccontoh studi/modul di aspek perencanaan pembangunan dan atau sektor ESDM ke email rekrutmen@pwypindonesia.org dengan *subject* email: [Renstra_Konsultan] Nama Lengkap, paling lambat **Jumat, 20 November 2020 Pukul 21.00 WIB.**

